



**Judul** : Regulator Kudu Awasi - Duh, QRIS Dipake Buat Judi Online  
**Tanggal** : Minggu, 08 Oktober 2023  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 6

## Regulator Kudu Awasi Duh, QRIS Dipake Buat Judi Online

SENAYAN menyoroti isu pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang disalahgunakan sebagai metode deposit dengan memasukkan dana ke akun judi online oleh oknum tertentu. Informasi ini beredar di beberapa media sosial.

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad memuji langkah cepat Bank Indonesia (BI) dalam menyiapkan mitigasi penyalahgunaan QRIS. BI menutup *barcode* QRIS milik dari merchant-merchant yang selama ini menjadi member (oknum penyalahguna QRIS untuk judi online). Kemudian mengkoordinasikannya dengan ASPI atau Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia.

"Untuk penutupan rekeningnya harus melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Ini harus dikoordinasikan," ucap politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Dia menegaskan, Komisi XI DPR akan terus mengawasi sejauh mana efektivitas dari berbagai langkah mitigasi yang telah ditempuh oleh BI tersebut. Termasuk, sejauh mana OJK dan APH bisa menindaklanjuti penutupan rekening.

"Serta, sejauh mana OJK dan APH bisa memproses hukum terhadap penggunaan QRIS sebagai alat untuk bertransaksi dalam judi online. Efektivitasnya akan terus kita lihat dalam beberapa bulan ke depan. Jadi tinggal kita awasi terus supaya efektivitasnya bisa terwujud," pungkasnya.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Fillianingsih Hendarta akan mewajibkan seluruh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) untuk menghentikan kerja sama dan layanan dengan merchant QRIS yang memfasilitasi atau melakukan ke-

giatan perjudian. BI mengancam akan membekukan QRIS milik merchant tersebut.

Selain itu, BI juga menginstruksikan PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN) sebagai pengelola National Merchant Repository QRIS untuk segera menghapus pendaftaran merchant yang teridentifikasi memfasilitasi atau melakukan tindak pidana perjudian sesuai dengan informasi dari PJP terkait.

"BI sesuai kewenangannya juga akan melakukan tindak lanjut pengawasan, termasuk pengenaan sanksi, terhadap PJP yang terbukti tidak memenuhi ketentuan di bidang sistem pembayaran," tandas Fillianingsih.

Sementara, anggota Komisi XI DPR Marinus Gea mengatakan, percepatan transaksi digital menggunakan sistem pembayaran QRIS mengalami peningkatan signifikan hampir diseluruh wilayah Indonesia. Hal itu terbukti saat Komisi XI DPR RI menggelar kunjungan lapangan meninjau beberapa tenant UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Marinus menyatakan, hampir seluruh UMKM kini menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu, dia mengapresiasi kinerja BI yang gencar melakukan sosialisasi QRIS sehingga UMKM menjadi terdigitalisasi.

Sebagaimana diketahui, kini hampir seluruh kegiatan jual beli didukung oleh QRIS, tidak hanya toko-toko besar, banyak UMKM yang menggunakan QRIS untuk proses pembayaran yang telah mencapai 37 juta pengguna. Sebagian besar merchantnya adalah UMKM, termasuk di *tenant-tenant* UMKM yang ada di Gowa, Provinsi Sulsel. ■ KAL